

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA MANAH RESMI
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI
RAWAS**

SKRIPSI



Oleh :

SITI MUSLIMAH

07011181520027

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI BERAS
SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA MANAH RESMI
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**SITI MUSLIMAH
07011181520027**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019


Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 19671201 199203 2002



Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Implementasi Kebijakan Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 31 Juli 2019.

Inderalaya, 31 Juli 2019

Ketua

1. Dr. Nurmah Semil
NIP. 196712011992032002

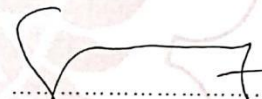


Anggota

2. Drs. Mardianto, M.si
NIP. 196211251989121001



3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP.195806091984031002



4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Magus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ikuti lah Alurnya, Ikhlas lah dalam berusaha, Tawakal kepada-Nya Keajaiban akan datang menyapa”

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penuh syukur Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Bapak tercinta Ismail dan ibu yang sangat kusayangi sukemsih yang selalu mendidik, memberikan dukungan dan bekerja keras untukku
2. Kakakku Tercinta Siti Sa'diyah dan Ika Damayanti beserta keluarga besar ku (Keluarga Abdurahman)
3. Teman Seperjuangan Administrasi Publik 2015
4. Dan Almamater kebangganku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu yang berjudul **“Implementasi Distribusi Beras Sejahtera di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.**

Penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan moril maupun materil. Untuk itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Ismail dan Ibunda Sukemsih serta kakak saya Diah dan Ika yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan serta yang selalu menjadi penyemangat bagi saya hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP UNSRI, Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan II FISIP UNSRI, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III FISIP UNSRI.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dr. Hj.Nurmah Semil, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah melayani penulis serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan proposal skripsi ini.
7. Kepala desa, Kepala dusun dan seluruh masyarakat di Desa Manah Resmi
8. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada kita.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kelemahan, kekurangan, maupun suatu kesalahan yang di sebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun semangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan laporan ini untuk kedepannya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita Bersama.

Inderalaya, Februari 2019

Penulis

Siti Muslimah

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGATAN.....	xii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan	13
B. Teori Implementasi Kebijakan	15
C. Penelitian Terdahulu	24
D. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB. III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Definisi Konsep.....	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis data dan Sumber data	33
E. Unit Analisis Data	33
F. Informan Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
I. Teknik Keabsahan Data.....	34

J. Teknik Analisis Data	36
BAB. IV PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Desa Manah Resmi.....	38
1. Kondisi Geografis	38
2. Gambaran Umum Demografis	39
3. Visi Misi Desa Manah Resmi	41
4. Struktur Organisasi	42
B. Implementasi Distribusi Beras Sejahtera.....	45
1. Pengertian Beras Sejahtera.....	45
2. Dasar Hukum Beras Sejahtera	45
3. Tujuan Sasaran dan Manfaat Beras Sejahtera.....	46
4. Mekanisme Penyaluran	47
5. Alur Distribusi dari Perum Bulog sampai ke RTS-PM.....	47
6. Indikator Kinerja Kegiatan Distribusi Beras Sejahtera.....	49
C. Hasil dan Pembahasan	49
1. Tingkat Kepatuhan	50
2. Lancarnya Rutinitas Fungsi	74
3. Kinerja dan Dampak	82
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2017	2
2. Pembangunan Daerah Tertinggal.....	3
3. Distribusi Beras Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan	7
4. Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Rastra di Desa Manah Resmi	8
5. Penelitian Terdahulu	27
6. Fokus Penelitian.....	32
7. Data Usia Sekolah dan Sarana Prasarana di Desa Manah Resmi	40
8. Potensi Unggulan Desa di Desa Manah Resmi.....	41
9. Pertumbuhan Ekonomi Desa Manah Resmi	41
10. Penilaian KPM Sasaran Penerima Beras Sejahtera	60
11. Realisasi Penyaluran Beras Sejahtera Tahun 2018-2019.....	66
12. Klasifikasi kualitas Beras Medium	71
13. Daftar Jumlah Penerima Beras Sejahtera di Tahun 2017-2018.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	30
2. Peta lokasi Desa Manah Resmi.....	38
3. Alur Distribusi dari Perum Bulog sampai RTS-PM.....	48
4. Pengecekan kualitas beras sejahtera.....	55
5. Penyerahan beras sejahtera.....	55
6. Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra.....	56
7. Rumah penerima Beras Sejahtera di Desa Manah Resmi.....	61
8. Jumlah beras yang diberikan kepada RTSPM.....	62
9. Beras Sejahtera untuk KPM.....	63
10. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas.....	65
11. Surat Jalan Bansos Rastra.....	67
12. Pengisian Daftar Hadir penerima bantuan sosial beras sejahtera.....	70
13. Daftar Hadir Penerima Beras Sejahtera di setiap Dusun.....	70
14. Kualitas Beras Sejahtera di Desa Manah Resmi.....	73
15. Wawancara dengan warga Desa Manah Resmi.....	73
16. Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra (BAST).....	76
17. wawancara dengan Kepala Desa.....	77
18. Penyerahan Beras Sejahtera.....	79
19. Masyarakat mengisi daftar hadir penerima bantuan sosial Rastra.....	80
20. Koordinasi antara perum bulog dan kepala desa melalui BAST.....	87
21. Sosialisasi Program Beras Sejahtera di Tingkat Kabupaten.....	89
22. Rekapitan daftar hadir penerima bantuan rastra di rumah kepala desa.....	92
23. Masyarakat ikut mengecek jumlah beras sejahtera.....	94
24. Masyarakat ikut mengecek kualitas beras sejahtera.....	94

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran	Halaman
1. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	109
2. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	110
3. SK Skripsi.....	111
4. Surat Izin Penelitian.....	112
5. Surat Balasan Penelitian.....	113
6. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/DINSOS/2019 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Penerima Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Musi Rawas.....	114
7. Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor: 05/4/PER/HK. 01/07/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera.....	115
8. Transkrip Wawancara.....	116

ABSTRACT


Sejahtera Rice research is based on several issues, including the inaccuracy of recipients of Sejahtera Rice, inaccurate distribution time, dissatisfaction with Sejahtera Rice quality and social jealousy in society. However, this has been regulated in the Musi Rawas Regent Decree Number 269 / KPTS Social Decree / 2019 The allocation for recipients of Food Bansos of Sejahtera Rice for beneficiary families in Musi Rawas Regency as well as the General Director of Poor Management Number 05/4 / PER / HK. 01/07/2018 about Technical Guidelines for Sejahtera Rice Distribution. The purpose of this study was to determine the implementation of Sejahtera Rice Distribution (Rastra) policy in Manah Resmi Village, Muara Beliti subdistrict, Musi Rawas Regency. This is a descriptive reasearch with qualitative method. The techniques used for collecting the data were observation, documentation and interviews. This research was conducted in the Manah Resmi Village, Muara Beliti Subdistrict, Musi Rawas Regency. The theories used were Ripley's and Franklin's. The results of this study revealed the Implementation of Sejahtera Rice distribution in Manah Resmi Village, Muara Beliti Subdistrict, Musi Rawas District ran quite smooth. This can be seen from the 3 Dimensions according to Ripley and Franklin, in the Compliance Level dimension, the implementor has been obedient to the task and the function, but for the target accuracy, the deadline accuracy and the quality indicators have not right. Function routine dimension has been running smoothly the coordination function and distribution function have been carried out even though the monitoring function is not running. Then the dimensions of performance and the impact on the performance dimension do not have socialization carried out by the government so that the community does not understand about the rastra program but the impact of the Sejahtera rice program is enough to provide benefits to the community.

Keywords: Implementation, Distributions, Rastra

Supervisor I


Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Supervisor II


Drs Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, June 2019
Chairman Departement of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

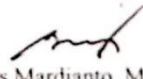
Penelitian program Beras Sejahtera dilatari beberapa permasalahan diantaranya ketidaktepatan penerima beras sejahtera, ketidaktepatan waktu pembagian, ketidakpuasan kualitas beras sejahtera yang di terima serta kecemburuan sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Padahal telah diatur di dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS Dinsos/2019 Tentang penetapan pagu alokasi penerima Bansos Pangan Beras Sejahtera bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Musi Rawas serta pada peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.01/07/2018 Tentang petunjuk Teknis Penyaluran Beras Sejahtera. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Jenis penelitian adalah Deskriptif dengan metode Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Penelitian ini dilakukan di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Teori implementasi yang digunakan Teori Ripley and Franklin. Hasil penelitian ini meenunjukkan bahwa Implementasi Distribusi Beras Sejahtera di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas cukup berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari 3 Dimensi menurut Ripley and Franklin, pada Dimensi Tingkat Kepatuhan implementor sudah taat terhadap tugas dan fungsi namun indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta ketepatan kualitas belum tepat. Dimensi Rutinitas fungsi telah berjalan cukup lancar fungsi koordinasi dan fungsi penyaluran telah dilaksanakan meski fungsi monitoring tidak berjalan. Kemudian dimensi kinerja dan dampak pada dimensi kinerja tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang Paham mengenai program rastra namun dampak dari program beras sejahtera sudah cukup memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Distribusi, Rastra


Pembimbing I


Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Pembimbing II


Drs Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, Juni 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3), yaitu: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap *klien*.”

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang sangat kompleks. Berbagai teori dan konsep telah dikembangkan untuk mengkaji persoalan ini yang dilakukan oleh banyak ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu. Berbagai strategi kebijakan publik juga telah dirumuskan oleh pemerintah untuk menaggulangi masalah ini. Widodo (2007:12) mendefinisikan Kebijakan Publik adalah “Serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.” Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, suku yang beragam dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun, kekayaan yang dimiliki Indonesia ternyata belum menjadikan Indonesia

menjadi negara maju. Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang dan salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi negara berkembang ialah tingginya angka kemiskinan.

Fenomena kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dalam satu dasawarsa terakhir belum rampung hingga usai. Kompleksitas kemiskinan menjadi salah satu penyebab, mengapa sudah 73 tahun Indonesia masih saja belum mampu menyelesaikan persoalan ini. Pada gilirannya, kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di negeri ini. Berdasarkan fakta, kemiskinan di Indonesia, data yang di lansir oleh BPS (Maret,2018) penduduk miskin mencapai 9,82 persen (25,95 juta jiwa) dengan presentasi sekitar 13,20 persen penduduk miskin berada di desa. Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin 1,09 juta orang (12,80%) dan menjadi daftar 11 Provinsi dengan jumlah warga miskin terbanyak, data yang di lansir oleh BPS Indonesia (Maret 2018). Angka kemiskinan di setiap daerah di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2017

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskin
1	Ogan Komering Ulu	2.47
2	Ogan Komering Ilir	2.95
3	Muara Enim	2.13
4	Lahat	2.45
5	Musi Rawas	2.52
6	Musi Banyuasin	1.79
7	Banyuasin	1.85
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1.65
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.90
10	Ogan Ilir	1.90
11	Empat Lawang	1.40
12	Palembang	1.76
13	Prabumulih	1.29
14	Pagaralam	1.09
15	Lubuk Linggau	2.14
16	Penukal Abab Lematang Ilir	2.19
17	Musi Rawas Utara	3.28

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota yang di antaranya Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Palembang, Prabumulih, Pagaram, Lubuk Linggau, Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara. Berdasarkan tabel 1 Ogan Ilir merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, kemudian Kabupaten Musi Rawas Utara dan yang ketiga Kabupaten Musi Rawas. Dari ketujuh belas kabupaten dan kota yang ada, terdapat beberapa kabupaten yang masih tergolong dalam daerah tertinggal. Kabupaten yang masih tergolong tertinggal di antaranya Ogan Komering Ilir, Lahat, Musi Rawas, Oku Selatan, Ogan Ilir dan Empat Lawang. Musi Rawas merupakan kabupaten yang sudah tua, namun usia tua tidak menjadi jaminan bagi sebuah kabupaten maju dalam segala bidang, buktinya Kabupaten Musi Rawas meskipun usianya memasuki 75 tahun, namun masih menyandang gelar sebagai kabupaten tertinggal, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 di Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan sebagai daerah tertinggal, bahkan data Badan Pusat Statistik kabupaten musu rawas menyebutkan jika desa tertinggal di kabupaten musu rawas berjumlah 33 desa, sedangkan desa yang sangat tertinggal berjumlah 12 desa. Menurut data Keputusan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi penetapan desa prioritas sasaran pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 126 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai Indeks	Status Perkembangan
1	Ogan Komering Ilir	Mesuji	Bhina karsa	73,09	Berkembang
2	Lahat	Kikim Tengah	Sungai Laru	49,76	Tertinggal
3	Musi Rawas	Muara Beliti	Manah Resmi	49,53	Tertinggal
4	OKU Selatan	Mekakau ilir	Srimenanti	49,93	Tertinggal
5	Ogan Ilir	Pemulutan	Kapuk	49,65	Tertinggal
6	Empat Lawang	Lintang kanan	Lesung Batu	61,21	Berkembang

Sumber : data Keputusan Menteri Desa

Tabel 2 menjelaskan bahwa sasaran pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi desa Bhina Karsa Kecamatan Mesuji kabupaten Ogan Komering Ilir sudah memiliki nilai indeks yang cukup tinggi 73,09 dengan status perkembangan sudah berkembang, kemudian Desa Kapuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pun sudah memiliki status perkembangan sudah berkembang. Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti memiliki nilai indeks terendah dengan status perkembangan tertinggal dengan nilai indeks 48,12, berdasarkan nilai indeks terendah di desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti sehingga peneliti tertarik mengambil lokasi di desa Manah Resmi.

Banyaknya daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa program bantuan bagi rakyat miskin. Dari sekian banyak program bantuan pemerintah salah satunya adalah program bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa disebut Beras Sejahtera. Program ini sendiri ditugaskan pemerintah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) salah satu indikator kemiskinan yaitu Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan). Dalam seminggu hanya mampu makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari dan hanya dapat mengkonsumsi daging, susu atau ayam sekali dalam seminggu. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia membuat sebuah program yaitu Rastra (Beras Sejahtera).

Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program dari pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Penyaluran Rastra merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/DINSOS/2019 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Penerima Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Musi Rawas, serta pada Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 05/4/PER/HK.01/07/2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Sejahtera. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan *electronic voucher (e-voucher)* dalam bentuk kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2017 transformasi Program Rastera menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Rastera. Berbagai aspek strategis Program Rastera, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastera serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Rastera (Pedum Rastera). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program Subsidi Rastera secara nasional.

Tujuan dan sasaran dibentuknya program subsidi Beras Sejahtera dijelaskan dalam petunjuk teknis (Juknis) program Beras Sejahtera Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut:

- a. Tujuan Program Beras Sejahtera Kabupaten Musi Rawas adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuh sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- b. Sasaran Program Beras Sejahtera di Kabupaten Musi Rawas adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 10 kg/RTS-PM/bulan.

Distribusi beras dalam program subsidi Beras Sejahtera di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/DINSOS/2019 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Penerima Bantuan Sosial Pangan Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Musi Rawas yakni “Alokasi setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sebanyak 10 kg/bulan tanpa biaya tebus di Titik Distribusi (TD)”. Penyaluran Rastra diawali dari permintaan alokasi (Surat Permintaan Alokasi- SPA) dari pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA tersebut ditunjukkan kepada Kadivre/Kasubdivre yang membawahi wilayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Rastra setempat dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke Titik Distribusi. Tim Koordinasi Rastra melakukan pengecekan kondisi beras sejahtera yang akan disalurkan.

Beras Rastra kemudian dikirimkan ke Titik Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata di wilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh Bulog. Apabila ada perubahan data RTS adalah kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan musyawarah Kecamatan.

Tabel 3 Distribusi Beras Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	RTS-PM (KK)	Per bulan (Kg)	Per 12 bulan (Kg)
1	Banyuasin	42.377	423.770	5.085.240
2	Muara Enim	35.465	354.650	4.255.800
3	Pagar alam	16.035	160.350	1.924.200
4	Ogan Komering Ulu	15.037	150.370	1.804.440
5	Musi banyuasin	36.800	368.000	4.416.000
6	Musi Rawas	24.134	241.340	2.896.080
7	Lubuk Linggau	9.441	94.410	1.132.92
8	Musi Rawas Utara	12.318	123.180	1.478.160
9	Lahat	26.205	262.050	3.144.600
10	Empat Lawang	12.141	121.410	1.456.920
11	Ogan Ilir	27.544	275.440	3.305.280
12	Ogan Komering Ilir	56.178	561.780	6.741.360
13	Ogan Komering Ulu S	18.023	180.230	2.162.760
14	Ogan Komering Ulu T	33.261	332.610	3.991.320
15	Pali	11.013	110.130	1.321.560
16	Palembang	97.667	976.670	11.720.040
17	Prabumulih	19.825	198.250	2.379.000

Sumber : Bulog kota Palembang

Berdasarkan Tabel 3 Distribusi Beras Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan kota Palembang merupakan daerah dengan rumah tangga sasaran penerima manfaat terbanyak dengan jumlah 97.667 KK dengan jumlah beras sejahtera sebanyak 976.670 Kg per bulan sedangkan Lubuk Linggau menjadi kota terendah dengan rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 9.441 KK dengan jumlah beras sejahtera yang di salurkan sebanyak 94.410 Kg per bulan.

Dalam aplikasinya di lapangan, program Rastra ini sendiri sering mengalami masalah dalam proses distribusinya, baik oleh faktor alam, teknis, maupun non teknis. Kendala yang muncul dapat mengganggu kelancaran distribusi. Dalam Proses Implementasi Distribusi Rastra Menurut Pedoman Umum Rastra (dalam Hastuti dkk, 2012), harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra yaitu tercapainya target 6T (Enam Tepat) Tepat sasaran penerimaan, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi.

Namun Beras Sejahtera yang sudah berjalan beberapa tahun ini masih saja di temukan permasalahan, khususnya di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi

Rawas, terdapat permasalahan- permasalahan yang terjadi bila di kaitkan dengan indikator keberhasilan Beras Sejahtera, maka dalam beberapa indikator masih belum terpenuhi seperti ketidaktepatan penerima Beras Sejahtera, ketidaktepatan waktu pembagian, kecemburuan sosial dan ketidakpuasan kualitas beras yang di terima. Jika di lihat dari indikator keberhasilan tersebut pendistribusian Rasta di Desa Manah Resmi belum tepat sasaran, ketidaktepatan waktu pembagian, kecemburuan soial dan ketidakpuasan kualitas beras yang diterima. Uraian berikut akan menyajikan Data Kependudukan dan Data Penerima Rasta di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 4 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Rasta di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

No	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Penerima Rasta dalam KK
1.	I	96	49	36
2.	II	66	25	22
3.	III	65	34	23
4.	IV	63	42	38
Jumlah	IV	290	150	119

Sumber :desa Manah Resmi Tahun 2018

Dari hasil pengamatan sementara, didapat data berdasarkan Tabel 4 bahwa Desa Manah Resmi terdapat 4 dusun yang terdiri dari dusun 1-4. Jumlah Kepala Keluarga Desa Manah Resmi Berjumlah 290 Kepala Keluarga. Jumlah keluarga penerima Rasta 119 KK sedangkan jumlah keluarga miskin sebanyak 150 KK. Berdasarkan tabel 4 Jumlah keluarga Miskin tidak seluruhnya menerima Beras Sejahtera akibat nya terjadi ketimpangan antara jumlah keluarga miskin dengan jumlah keluarga penerima beras sejahtera.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu belum optimalnya Implementasi Pendistribusian Rasta. sehingga berdasarkan kenyataan di lapangan secara umum program rasta belum sesuai dengan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan program Rasta oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Distribusi Rasta di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas?
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan Distribusi Rasta di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan ilmu Konsentrasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan bahan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui informasi dan gambaran yang riil tentang implementasi Distribusi Rastra di Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiati, Yunia. 2016. *Hubungan Antara Dukungan Sosial, Teman Sebaya dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Penggunaan Bahasa Bilingual pada Santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto*. Fakultas Psikologi. Uin Malik Ibrahim Malang. Dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/1197/12/11410116_Ringkasan.pdf. diakses 15 April 2019.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Arief, Ibnu Sazmie, 2017, "Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru", *JOM Fisip*, Vol. 4 No, 2, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/184754-ID-evaluasi-pelaksanaan-program-raskin-dike.pdf>, diakses 17 februari 2019.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Browne dan Wildavsky. 2004. (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70)
- Bulog. 2012. *Distribusi Raskin Dari Gudang Bulog Sampai RTS*. (Online). (<http://www.bulog.co.id/alurdistribusi.php>, diakses 11 Maret 2018)
- Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2008:139)
- Desa Manah Resmi.2018. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Kabupaten Musi Rawas
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Dye, Thomas R., 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. United States of America: Congressional Quarterly Press.
- Indiahono. Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Jogjakarta: Gava Media.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
- Islamy, M. L., 1996, *Kebijakan Publik*, Model-UT, Karunika UT, Jakarta.
- Keban, Yeremias T.2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media.
- Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 211/KPTS/BKP/2016 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

- Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 1993).
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nisak, Amelia Fitrotun. 2014. Implementasi kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif Pada Kelurahan Tanah Kalikedinding. *Jurnal Politik Muda*. Volume 3, Nomor 2, 2014: 2302-8068. dalam [http://journal.unair.ac.id/JPM@implementasi-kebijakan-beras-miskin-\(raskin\)-di-kecamatan-kenjeran-kota-surabaya-article-6690-media-80-category-.html](http://journal.unair.ac.id/JPM@implementasi-kebijakan-beras-miskin-(raskin)-di-kecamatan-kenjeran-kota-surabaya-article-6690-media-80-category-.html), diakses 17 Februari 2019.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pedoman Umum Beras Sejahtera Tahun 2015.
- Purwanto, Erwan Agus., dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Olivia. 2018. Efektivitas Sistem Distribusi RASTRA Pada Perum Bulog Samarinda (Studi Kasus Sungai Pinang Dalam Samarinda). *eJournal Administrasi Bisnis*. Volume 6, Nomor 2, 2018: 776-788. dalam [http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/05/jurnal%20oliv%20baru%20\(05-25-18-06-36-25\).pdf](http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/05/jurnal%20oliv%20baru%20(05-25-18-06-36-25).pdf), diakses 17 Februari 2019.
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indoonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2003. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Winarni, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.